



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI MUHAMMAD ASRUN**
2. Jabatan : **ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**
3. NHK : **1000091**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 33.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 398.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MIKRO MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, WULING MOBIL PENUMPANG Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 252.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	190.000.001
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	34.340.000.001
III. HUTANG	Rp.	66.749.999
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	34.273.250.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.